



RENCANA KERJA 2026

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA BLITAR**

DAFTAR ISI

Daftar Isi	ii
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	17
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	19
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	21
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	32
Bab III Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah.....	33
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	33
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	34
3.3 Program Dan Kegiatan	
Bab IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	35
Bab V Penutup	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh masing-masing perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Penyusunan Renja dilakukan untuk menjabarkan kebijakan dan prioritas pembangunan yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta untuk memastikan keterpaduan antara perencanaan pembangunan daerah dan nasional.

Mengacu pada ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan daerah dan nasional. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran tahunan melalui Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan menjadi dasar utama dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai dengan penyusunan rancangan awal yang memuat hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya, isu strategis daerah, dan kerangka program serta kegiatan tahun rencana. Rancangan awal ini dibahas melalui forum perangkat daerah dan forum konsultasi publik, guna menjaring masukan dari pemangku kepentingan. Selanjutnya, Renja dirumuskan secara final untuk menjadi masukan utama dalam penyusunan RKPD.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 memiliki posisi strategis dalam mendukung perencanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan. Dokumen ini memiliki keterkaitan dan sinergi dengan:

1. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2026–2030, yang menjadi arah kebijakan jangka menengah masing-masing perangkat daerah.
2. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L), yang memuat program pusat yang bersinergi dan mendukung urusan pemerintahan daerah, terutama pada bidang-bidang yang menjadi kewenangan bersama.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagai arah pembangunan jangka menengah dan panjang yang dijadikan acuan dalam perumusan kebijakan tahunan.

Sebagai tindak lanjut, Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026. Dengan demikian, penyusunan Renja harus dilakukan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel, serta didasarkan pada data dan informasi yang valid, guna menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program pembangunan daerah.

Pentingnya keterpaduan antara dokumen perencanaan dan penganggaran menuntut agar Renja Perangkat Daerah tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga menjadi alat untuk memastikan perencanaan yang berorientasi hasil, mendukung capaian indikator pembangunan daerah, serta menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Blitar Tahun 2026 meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
5. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
26. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
29. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);
30. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 2);
31. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 3);
32. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Blitar Nomor 5);
33. Peraturan Walikota Blitar Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
34. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2023 Nomor 65);
35. Peraturan Walikota Blitar Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2025 Nomor 23);
36. Peraturan Walikota Blitar Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahun 2026 yang menjadi penjabaran RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 serta disusun mengacu pada RKPD Tahun 2026. Sedangkan Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 adalah sebagai pedoman penyusunan KUAPPAS Tahun 2026 dan Rencana

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Blitar Tahun 2026.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar Tahun 2026 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Realisasi kinerja Tujuan Strategis Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Blitar "Meningkatnya Nilai Investasi Daerah" tahun 2024 mencapai 12,38%, jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar 0,42%. Jika diasumsikan capaian tahun 2025 adalah sesuai target (0,47%), maka total capaian hingga tahun 2025 adalah 24,4%, atau baru sekitar 18,2% dari target akhir Renstra tahun 2026 sebesar 133,85%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pencapaian target Renstra masih jauh dari memadai. Dan hal ini berbanding terbalik dengan realisasi kinerja Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal Dan PTSP "Meningkatnya Jumlah Realisasi Investasi" yang menunjukkan kinerja positif dalam mendukung peningkatan investasi daerah, dimana realisasi tahun 2024 sebesar Rp 432,73 milyar. Jika diasumsikan capaian tahun 2025 sama dengan tahun 2024 maka capaian kinerja Sasaran Strategis sampai dengan tahun 2025 telah melampaui target Renstra Rp 391 milyar. Berikut tabel capaian kinerja Renja dan Renstra Dinas penanaman Modal dan PTSP sampai dengan tahun 2025 dan proyeksi capaian tahun 2026.

**Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan
Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2025
Kota Blitar**

Nama PD: Dinas Penanaman Modal dan PTSP

No	Kode				Urusan/ bidang urusan pemerintahan daerah/Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Th 2021-2026	Realisasi kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d th 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan th 2025	Perkiraan realisasi capaian target renstra PD s/d th 2025	
									Target Renja PD th 2024	Realisasi Renja PD th 2024	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d th 2025	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
	1				2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
1					Tujuan Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	85,71 (A)	85,66 (A)	85,67 (A)	86,59 (A)	101,07%	84,8 (A)	86,59 (A)	101%
					Sasaran Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	85,71 (A)	85,66 (A)	85,67 (A)	86,59 (A)	101,07%	84,8 (A)	86,59 (A)	101%
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,1	84,65	84,5 (baik)	87,5 (baik)	103,6%	84,8 (Baik)	91,3	107,3%
					Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21		7	7	100%	7	14	66,7%
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15		5	5	100%	5	10	66,7%

[illegible]

No	Kode				Urusan/ bidang urusan pemerintahan daerah/Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Th 2021-2026	Realisasi kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d th 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan th 2025	Perkiraan realisasi capaian target renstra PD s/d th 2025	
									Target Renja PD th 2024	Realisasi Renja PD th 2024	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d th 2025	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
	1				2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3		1	1	100%	1	2	66,7%
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15		5	5	100%	5	10	66,7%
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9		3	3	100%	3	6	66,7%
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	102		34	34	100%	34	68	66,7%
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3		1	1	100%	1	2	66,7%
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	36		12	12	100%	12	24	66,7%
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75		25	25	100%	25	50	66,7%
					Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%
					Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	6		2	2	100%	2	4	66,7%

No	Kode				Urusan/ bidang urusan pemerintahan daerah/Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Th 2021-2026	Realisasi kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d th 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan th 2025	Perkiraan realisasi capaian target renstra PD s/d th 2025	
									Target Renja PD th 2024	Realisasi Renja PD th 2024	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d th 2025	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
	1				2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
					Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	17		54	54	100%	5	59	347,1%
					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	1		1	1	100%	1	1	100%
					Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	108		36	36	100%	36	36	100%
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	108		36	36	100%	36	72	66,7%
					Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9		5	5	100%	3	6	66,7%
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	183		61	61	100%	61	122	66,7%

No	Kode				Urusan/ bidang urusan pemerintahan daerah/Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Th 2021-2026	Realisasi kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d th 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan th 2025	Perkiraan realisasi capaian target renstra PD s/d th 2025	
									Target Renja PD th 2024	Realisasi Renja PD th 2024	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d th 2025	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
	1				2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
					Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	0					2	2	
2					Tujuan Meningkatnya nilai investasi daerah	Persentase peningkatan nilai investasi daerah	133,85%	11,54%	0,42%	12,38%	2948%	0,47%	24,39%	18,2%
					Sasaran Meningkatnya jumlah realisasi investasi	Jumlah realisasi investasi (milyar rupiah)	391	385,06	387	432,73	111,8%	389	389	99,5%
					Program Pengembangan iklim penanaman modal	Persentase peningkatan potensi investasi yang teridentifikasi	65%	87,36%	55,00%	57,20%	104,00%	60%	60%	92,3%
					Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas /Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kebijakan pemberian fasilitas/ insentif bidang penanaman modal yang ditetapkan	3	1	1	1	100%	1	2	66,7%
					Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	3		1	1	100%	1	2	66,7%
3					Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	3		1	1	100%	1	2	66,7%

No	Kode				Urusan/ bidang urusan pemerintahan daerah/Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Th 2021-2026	Realisasi kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d th 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan th 2025	Perkiraan realisasi capaian target renstra PD s/d th 2025	
									Target Renja PD th 2024	Realisasi Renja PD th 2024	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d th 2025	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
	1				2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
					Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah peta potensi investasi yang tersedia	3		1	1	100%	1	2	66,7%
					Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	3		1	1	100%	1	2	66,7%
4					Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	3		1	1	100%	1	2	66,7%
					Program Promosi penanaman modal	Persentase peningkatan informasi potensi investasi yang dipromosikan	60%	44,10%	50%	50%	100%	55%	55%	91,7%
					Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase potensi informasi yang dipromosikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	3		1	1	100%	1	2	66,7%
					Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase penerbitan izin sesuai SOP	99,70%	99,62%	99,50%	99,74%	100,24%	99,60%	99,6%	99,9%
5					Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kenaikan pelaku usaha yang mengurus izin usahanya	4%		3%	3,05%	101,67%	4%	4%	100%

No	Kode				Urusan/ bidang urusan pemerintahan daerah/Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Th 2021-2026	Realisasi kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d th 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan th 2025	Perkiraan realisasi capaian target renstra PD s/d th 2025	
									Target Renja PD th 2024	Realisasi Renja PD th 2024	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d th 2025	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
	1				2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
					Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	3434		1100	3542	322%	1144	4686	136,5%
					Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	10		4	14	350%	3	17	170%
					Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	12411		3976	2641	66,42%	4135	6776	54,6%
					Program Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Persentase peningkatan perusahaan tertib pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	85%		80%	83,15%	103,94%	80%	80%	94,1%

No	Kode				Urusan/ bidang urusan pemerintahan daerah/Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Th 2021-2026	Realisasi kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d th 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan th 2025	Perkiraan realisasi capaian target renstra PD s/d th 2025	
									Target Renja PD th 2024	Realisasi Renja PD th 2024	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d th 2025	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
	1				2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
					Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM	375		125	300	240%	125	250	66,7%
					Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	24		7	18	257,14%	8	8	100%
					Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	1000		300	300	100,00%	350	350	100%
					Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	39		13	18	138,46%	13	13	100%

Dari Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2025 dapat diketahui:

- Realisasi program yang tidak memenuhi target kinerja pada akhir periode Renstra Tahun 2026.
 - 1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan indikator kinerja Persentase peningkatan potensi investasi yang teridentifikasi, target= 65%; realisasi =60%.
 - 2) Program Promosi Penanaman Modal dengan indikator kinerja Persentase peningkatan informasi potensi investasi yang dipromosikan, target = 60%; realisasi 55%.
 - 3) Program Pelayanan Penanaman Modal dengan indikator kinerja Persentase penerbitan izin sesuai SOP, target = 99,7%; realisasi = 99,6%.
 - 4) Program pengendalian Penanaman Modal dengan indikator kinerja Persentase peningkatan perusahaan tertib pelaporan LKPM, target = 85%; realisasi 80%;
- Realisasi program yang memenuhi target kinerja pada akhir periode Renstra Tahun 2026.
 -
- Realisasi program yang melebihi target kinerja pada akhir periode Renstra Tahun 2026.
 - 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat, target = 85,1; realisasi = 91,3.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja:

- Target akhir Renstra pada tahun 2026 sedangkan capaian kinerja Renja masih pada TW II tahun 2025.

Faktor-faktor penyebab capaian kinerja melebihi target kinerja:

- Peningkatan kualitas pelayanan publik.
- SDM pelayanan yang responsif (petugas pelayanan memiliki kompetensi dan sikap proaktif dalam membantu pemohon, sehingga menumbuhkan rasa puas dan nyaman).
- Fasilitas pelayanan yang lebih nyaman, aman dan ramah pengguna.
- Informasi layanan disampaikan dengan jelas melalui berbagai kanal (website, media sosial, loket informasi).
- Respon cepat terhadap pengaduan masyarakat.

Berdasarkan capaian kinerja program pada akhir periode Renstra Tahun 2026 tersebut diatas, terlihat bahwa meskipun terdapat keberhasilan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang melebihi target Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat, masih terdapat empat program strategis yang belum memenuhi target. Hal ini berimplikasi pada potensi tidak tercapainya target Renstra secara penuh apabila tidak dilakukan langkah perbaikan yang terukur.

Untuk mengatasi hal tersebut, kebijakan perencanaan dan penganggaran perlu diarahkan pada penguatan proses identifikasi potensi investasi melalui pembaruan dan digitalisasi basis data berbasis teknologi

informasi, disertai koordinasi lintas perangkat daerah guna memastikan kelengkapan dan akurasi data. Anggaran promosi investasi perlu difokuskan pada media digital, pameran berskala nasional, serta *business matching* yang melibatkan pelaku usaha strategis. Pada sisi pengendalian, perlu dialokasikan sumber daya untuk sosialisasi, pendampingan teknis, dan penerapan insentif maupun sanksi ringan guna meningkatkan kepatuhan pelaporan LKPM.

Di samping itu, kualitas pelayanan perizinan perlu terus dijaga melalui penyempurnaan SOP. Keberhasilan capaian IKM yang melampaui target dapat dimanfaatkan sebagai modal sosial untuk membangun kepercayaan publik, mendorong partisipasi pelaku usaha, dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam mendukung program-program yang belum mencapai target. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kinerja program pada periode berikutnya dapat lebih optimal dan target Renstra dapat tercapai secara menyeluruh.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar

No	Indikator	IKK/ IKU/ SPM	Target Kinerja SKPD Tahun				Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Persentase peningkatan investasi	IKK	0,30 %	0,36 %	0,42%	0,47%	33,57 %	11,54 %	12,38%	12,38%	1,5%	2%	Tercapai
	Realisasi Total terhadap target investasi	IKK	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	Tercapai
3	Jumlah realisasi investasi (milyar rupiah)	IKU	167,2	167,8	387	389	345,22	385,06	432,73	432,73	-	-	Tercapai
4	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	IKU	A	84,8 (A)	A (85,67)	A (85,69)	85,47 (A)	85,66 (A)	A (85,67)	A (86,59)	-	-	Tercapai
	Realisasi Investasi (Triliun Rupiah)	IKU, IKD	-	-	-	-	-	-	-	-	0,443 62	0,452 5	Tercapai

Indikator "Persentase peningkatan investasi" pada Tahun 2022 menunjukkan peningkatan yang sangat tinggi sebesar 33,57%, yang merupakan efek pemulihan pasca pandemi. Namun, terjadi penurunan di tahun 2023 menjadi 11,54% dan stabil di kisaran 12,38% pada tahun 2024 serta proyeksi di tahun 2025. Sedangkan untuk target 2026 dan 2027 (periode Renstra baru 2026-2030) jauh

lebih rendah, yaitu 1,5% dan 2% karena asumsi basis capaian investasi yang sudah tinggi, sehingga sulit mencapai persentase pertumbuhan yang besar.

Atas kondisi tersebut, implikasi yang timbul terhadap target capaian Renstra DPMPTSP Kota Blitar adalah:

a) Kecenderungan target lebih rendah

Target pertumbuhan investasi (1,5–2%) tampak lebih rendah dibanding capaian tahun-tahun sebelumnya. Ini bukan berarti penurunan kinerja, melainkan konsekuensi yang wajar dari tingginya baseline. Semakin besar nilai investasi yang sudah masuk, semakin sulit mencapai pertumbuhan persentase yang tinggi.

b) Kemungkinan penilaian yang tidak tepat terhadap kinerja

Publik atau pemangku kepentingan bisa menilai kinerja menurun, padahal realisasinya bisa saja tetap tinggi dalam nilai absolut (rupiah).

c) Fokus pada kualitas, bukan kuantitas.

Dengan target persentase rendah, arah kebijakan lebih ditekankan pada kualitas investasi (investasi berbasis potensi lokal, padat karya, ramah lingkungan dan mendukung UMKM).

Memperhatikan implikasi yang timbul, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang diperlu diambil adalah:

- a) Pengalokasian anggaran pada fasilitasi investasi mencakup pendampingan, penyediaan informasi peluang investasi serta kegiatan promosi yang lebih selektif dan berbasis potensi unggulan daerah.
- b) Penguatan integrasi sistem layanan perizinan dan investasi melalui transformasi digital untuk mempercepat proses perizinan, meningkatkan transparansi, dan memberikan kepastian hukum bagi investor.
- c) Mendorong reinvestasi dari investor yang sudah ada melalui pemberian insentif, pelayanan yang prima, serta penguatan koordinasi lintas sektor untuk menjaga keberlanjutan iklim investasi.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan kepada masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Sesuai amanah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar melayani 9 sektor Perizinan Berusaha dengan KBLI, 6 sektor Perizinan Berusaha Non KBLI, 12 sektor Perizinan Non Berusaha Non KBLI dan 46 jenis perizinan daerah.

Di bidang penanaman modal, DPMPTSP Kota Blitar berusaha meningkatkan daya tarik investasi bagi calon investor dengan menyelenggarakan promosi investasi melalui event “Soekarno Coffe Fest” dan keikutsertaan pada event promosi tingkat provinsi dan nasional. Sedangkan untuk meningkatkan tertib pelaporan LKPM bagi pelaku usaha, dilaksanakan pembinaan dan pengawasan penanaman modal melalui bimtek dan kunjungan langsung ke perusahaan-perusahaan.

Secara umum tingkat kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menunjukkan capaian yang cukup baik dalam upaya memberikan layanan perizinan dan nonperizinan yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel. Hal ini tercermin dari meningkatnya jumlah layanan yang terlayani secara digital, percepatan waktu penyelesaian izin, serta bertambahnya pelaku usaha yang mengakses layanan secara daring maupun melalui Mal Pelayanan Publik (MPP). Penerapan sistem OSS-RBA (Online Single Submission Risk-Based Approach) juga turut mendukung transformasi pelayanan menjadi lebih terstandarisasi dan efisien.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Blitar menghadapi permasalahan dan hambatan, yaitu:

- Belum optimalnya fungsi pengawasan dan pengendalian.
- Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya legalitas usaha dan ragam izin usaha yang perlu dimiliki.
- Para pelaku usaha belum tertib dalam penyampaian LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal).
- Laporan yang disajikan dalam sistem OSS RBA belum bisa memenuhi kebutuhan.
- Naskah akademis Kebijakan Pemberian Insentif Penanaman Modal telah disusun namun belum menjadi Perda.
- Terbatasnya akses komunikasi dan konsultasi kepada pemilik kewenangan perizinan yang bukan merupakan kewenangan Pemerintah daerah.

- Ketidadaan tupoksi yang secara khusus yang mengatur bidang Penanaman Modal dan bidang pelayanan perizinan berpotensi menimbulkan tumpang tindih maupun kekosongan pelaksanaan fungsi tertentu.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan adalah:

- Memastikan pelayanan yang mudah, cepat dan transparan serta beradaptasi dengan perkembangan teknologi.
- Meningkatkan kualitas sdm, sarana prasarana serta teknologi informasi.
- Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan pelayanan.

Sedangkan peluang Dinas Penanaman Modal Dan PTSP dalam meningkatkan pelayanan adalah:

- Adanya kebijakan reformasi birokrasi, digitalisasi layanan publik dan percepatan kemudahan berusaha menjadi landasan kuat untuk membenahan pelayanan.
- MPP sebagai sarana pelayanan yang terintegrasi dan terstandar menjadi simbol layanan publik yang modern dan terjangkau.
- Kolaborasi dengan lembaga keuangan, asosiasi pengusaha dan platform digital membuka inovasi layanan dan akses informasi.

Mengacu pada tingkat kinerja pelayanan, permasalahan dan hambatan serta tantangan dan peluang Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar maka isu-isu penting yang perlu diperhatikan adalah:

1. Meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan izin dan kegiatan usaha.
2. Mengoptimalkan keberadaan Mal Pelayanan Publik sebagai pusat integrasi layanan lintas sektor.
3. Meningkatkan edukasi masyarakat tentang perizinan usaha baik melalui pendampingan dan/atau sosialisasi maupun publikasi media sosial dan elektronik.
4. Menyediakan panduan perizinan sederhana dan mudah dipahami dalam berbagai format (digital dan cetak).

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Blitar Tahun 2026 berpedoman pada Visi RPJMD *“Kota Blitar yang maju, sehat dan sejahtera menuju Kota Masa Depan”* dengan fokus pembangunan tahun 2026 yaitu *“Penguatan pondasi transformasi bidang pelayanan dasar yang didukung kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur yang berkelanjutan.”*

Sebagai perangkat daerah yang memiliki mandat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal, DPMPTSP berperan strategis dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Tema pembangunan tahun 2026 dimaknai oleh DPMPTSP sebagai momentum untuk memperkuat tata kelola pelayanan perizinan dan nonperizinan yang cepat, transparan, dan akuntabel, sekaligus memperluas promosi peluang investasi berbasis potensi unggulan daerah.

Dalam mendukung penguatan pondasi transformasi pelayanan dasar, DPMPTSP akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi melalui pengembangan sistem layanan digital yang terintegrasi, peningkatan kompetensi aparatur pelayanan, serta pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur penunjang pelayanan publik. Pada aspek penanaman modal, kebijakan diarahkan untuk pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal, meningkatkan intensitas promosi dan fasilitasi investasi, serta memperbaiki mekanisme pengendalian dan pelaporan investasi melalui peningkatan kepatuhan pelaku usaha.

Dengan langkah-langkah tersebut, Renja DPMPTSP Tahun 2026 diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, peningkatan daya tarik investasi, dan penguatan struktur ekonomi daerah yang mendukung tercapainya Kota Blitar yang maju, sehat, dan sejahtera menuju Kota Masa Depan.

Berikut disajikan Tabel Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026:

**Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kota Blitar**

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan
No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Penting
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kota Blitar	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar/ ketentuan yang berlaku	100%	Rp5.008.001.3 13	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kota Blitar	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar/ ketentuan yang berlaku	100%	Rp5.053.534.0 22	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	Rp28.001.400	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	Rp33.051.400	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokume n	Rp2.001.400	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokum en	Rp2.001.400	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19 Laporan	Rp2.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19 Lapora n	Rp2.000.000	
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kota Blitar	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	Rp2.000.000	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kota Blitar	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	Rp7.050.000	
	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Rp10.000.000	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Rp10.000.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	11 Dokumen	Rp2.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	11 Dokumen	Rp2.000.000	
	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Kota Blitar	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	0 Berita Acara	Rp10.000.000	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Kota Blitar	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	0 Berita Acara	Rp10.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	Rp3.036.919.536	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	Rp3.036.919.536	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/Bulan	Rp3.034.919.536	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/Bulan	Rp3.034.919.536	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Blitar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	19 Laporan	Rp2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Blitar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	19 Laporan	Rp2.000.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai standar	100%	Rp2.406.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai standar	100%	Rp2.406.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	Rp2.406.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	Rp2.406.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	Rp105.640.600	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	Rp105.640.600	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	Rp50.710.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	Rp50.710.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	148 Orang	Rp54.930.600	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	148 Orang	Rp54.930.600	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	Rp491.508.277	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	Rp486.458.277	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Blitar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp35.684.500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Blitar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp35.684.500	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Rp109.998.300	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Rp109.998.300	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	Rp29.404.200	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	Rp29.404.200	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	Rp44.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	Rp44.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Blitar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp32.082.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Blitar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp32.082.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Blitar	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	5 Dokumen	Rp18.366.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Blitar	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	5 Dokumen	Rp18.366.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	Rp149.969.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	Rp149.969.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10 Dokumen	Rp66.954.277	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10 Dokumen	Rp66.954.277	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Rp5.050.000						

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Blitar	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100%	Rp138.978.300	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Blitar	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100%	Rp184.511.009	
	Pengadaan Mebel	Kota Blitar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	Rp1.770.800	Pengadaan Mebel	Kota Blitar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	Rp1.770.800	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	Rp127.418.500	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	Rp127.418.500	
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kota Blitar	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	22 Unit	Rp9.789.000	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kota Blitar	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	22 Unit	Rp9.789.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Blitar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Rp45.532.709	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Blitar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Rp45.532.709	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	Rp995.048.800	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	Rp995.048.800	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	Rp159.031.200	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	Rp159.031.200	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	39 Laporan	Rp836.017.600	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	39 Laporan	Rp836.017.600	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan	100%	Rp209.498.400	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan	100%	Rp209.498.400	

Rancangan Awal RKP						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Blitar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit	Rp0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Blitar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit	Rp56.667.600	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	Rp109.254.300	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	Rp52.586.700	
	Pemeliharaan Mebel	Kota Blitar	Jumlah Mebel yang Dipelihara	32 Unit	Rp19.870.000	Pemeliharaan Mebel	Kota Blitar	Jumlah Mebel yang Dipelihara	32 Unit	Rp19.870.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	74 Unit	Rp44.874.100	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	74 Unit	Rp44.874.100	
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kota Blitar	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	Rp25.500.000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kota Blitar	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	Rp25.500.000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Blitar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	Rp10.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Blitar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	Rp10.000.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Kota Blitar	Realisasi Total terhadap Target Investasi	100%	Rp59.914.400	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Kota Blitar	Realisasi Total terhadap Target Investasi	100%	Rp59.914.400	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas /Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Kebijakan Pemberian Fasilitas/ Insentif Bidang Penanaman Modal yang Ditetapkan	1 Dokumen	Rp59.914.400	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas /Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Kebijakan Pemberian Fasilitas/ Insentif Bidang Penanaman Modal yang Ditetapkan	1 Dokumen	Rp59.914.400	
	Sub Kegiatan-1 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kota Blitar	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	Rp20.240.000	Sub Kegiatan-1 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kota Blitar	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	Rp20.240.000	
	Sub Kegiatan-2 Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota	Kota Blitar	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 Dokumen	Rp27.827.600	Sub Kegiatan-2 Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota	Kota Blitar	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 Dokumen	Rp27.827.600	
	Sub Kegiatan-3 Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Kota Blitar	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	1 Dokumen	Rp11.846.800	Sub Kegiatan-3 Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Kota Blitar	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	1 Dokumen	Rp11.846.800	
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kota Blitar	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	1%	Rp505.658.200	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kota Blitar	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	1%	Rp505.658.200	
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Kerja Sama Penanaman Modal	1 Kerjasama	Rp505.658.200	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Kerja Sama Penanaman Modal	1 Kerjasama	Rp505.658.200	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Sub Kegiatan 1 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp484.476.600	Sub Kegiatan 1 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp484.476.600	
	Sub Kegiatan 2 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	0 Dokumen	Rp21.181.600	Sub Kegiatan 2 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	0 Dokumen	Rp21.181.600	
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Kota Blitar	1. Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan 2. IKM pelayanan perizinan	100% 91,5	Rp378.377.900	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Kota Blitar	1. Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan 2. IKM pelayanan perizinan	100% 91,5	Rp378.377.900	
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Blitar	Persentase penerbitan izin sesuai SOP	100%	Rp378.377.900	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Blitar	Persentase penerbitan izin sesuai SOP	100%	Rp378.377.900	
	Sub Kegiatan 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kota Blitar	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp8.250.000	Sub Kegiatan 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kota Blitar	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp8.250.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Sub Kegiatan 2 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kota Blitar	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1500 Pelaku Usaha	Rp100.898.600	Sub Kegiatan 2 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kota Blitar	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1500 Pelaku Usaha	Rp100.898.600	
	Sub Kegiatan 3 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Kota Blitar	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	120 Pelaku Usaha	Rp59.031.200	Sub Kegiatan 3 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Kota Blitar	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	120 Pelaku Usaha	Rp59.031.200	
	Sub Kegiatan 4 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kota Blitar	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	100 Kegiatan Usaha	Rp210.198.100	Sub Kegiatan 4 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kota Blitar	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	100 Kegiatan Usaha	Rp210.198.100	
	ROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kota Blitar	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	100%	Rp110.000.000	ROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kota Blitar	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	100%	Rp110.000.000	
	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Persentase penanganan pengaduan yang dilaksanakan sesuai SOP	100%	Rp110.000.000	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Persentase penanganan pengaduan yang dilaksanakan sesuai SOP	100%	Rp110.000.000	

Rancangan Awal RKP						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Sub Kegiatan 1 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kota Blitar	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	8 Kegiatan Usaha	Rp25.000.000	Sub Kegiatan 1 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kota Blitar	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	8 Kegiatan Usaha	Rp25.000.000	
	Sub Kegiatan 2 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kota Blitar	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	350 Pelaku Usaha	Rp30.000.000	Sub Kegiatan 2 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kota Blitar	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	350 Pelaku Usaha	Rp30.000.000	
	Sub Kegiatan 3 Pengawasan Penanaman Modal	Kota Blitar	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	200 Kegiatan Usaha	Rp55.000.000	Sub Kegiatan 3 Pengawasan Penanaman Modal	Kota Blitar	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	200 Kegiatan Usaha	Rp55.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Kota Blitar	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	100%	Rp20.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Kota Blitar	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	100%	Rp20.000.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Persentase data dan informasi perizinan yang terintegrasi	100%	Rp20.000.000	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Persentase data dan informasi perizinan yang terintegrasi	100%	Rp20.000.000	
	Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Blitar	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	30 Dokumen	Rp20.000.000	Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Blitar	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	30 Dokumen	Rp20.000.000	

Berdasarkan tabel Review Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 diatas dapat disimpulkan bahwa pagu anggaran pada masing-masing program/kegiatan/sub kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagian besar telah selaras dengan hasil analisa kebutuhan, kecuali pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang menunjukkan selisih antara pagu rancangan awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan. Hal ini karena untuk menghindari potensi kekurangan pendanaan pada kegiatan penunjang yang bersifat operasional dan mendukung kelancaran program strategis lainnya.

2.5 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

Dalam rangkaian pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan, telah dihimpun sejumlah usulan kegiatan dari pemangku kepentingan yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar, khususnya dalam mendukung peningkatan pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha terhadap perizinan dan legalitas usaha. Usulan tersebut terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.5 Usulan Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kota Blitar

No	Usulan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Sosialisasi dan pendampingan pendaftaran legalitas usaha	Program Pelayanan Penanaman Modal Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan	Kelurahan Turi	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	15 orang	Dapat diakomodir tetapi disesuaikan dengan ketersediaan anggaran
2	Fasilitasi pengurusan NIB		Kelurahan Sukorejo		20 orang	
3	Workshop dan sosialisasi periziinan NIB		Kelurahan Karangtengah		30 orang	
4	Sosialisasi perizinan UMKM		Kelurahan Sananwetan		2 titik	

No	Usulan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
5	Sosialisasi perizinan, pendampingan dan pendaftaran	Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kelurahan Klampok		30 orang	

Seluruh usulan tersebut menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat akan layanan informasi, pendampingan, dan fasilitasi perizinan, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan prioritas dalam perencanaan program dan kegiatan DPMPTSP Tahun 2026. Pelaksanaan kegiatan ini diharapkan mampu mendorong peningkatan jumlah pelaku usaha yang memiliki legalitas lengkap, memperkuat kepastian hukum usaha, serta berkontribusi pada iklim investasi yang kondusif di Kota Blitar.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 mengusung tema besar “Kedaulatan Pangan dan Energi” serta “Ekonomi yang Produktif dan Inklusif” sebagai pijakan utama dalam mengarahkan pembangunan nasional. Tema ini mencerminkan komitmen untuk memperkuat kemandirian bangsa di sektor pangan dan energi, sekaligus memastikan pertumbuhan ekonomi yang merata, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, RKP 2026 menetapkan prioritas pembangunan yang mencakup:

1. Penguatan Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HAM melalui peneguhan nilai-nilai Pancasila, penguatan sistem demokrasi, dan penjaminan hak asasi manusia sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Pemantapan Sistem Pertahanan dan Keamanan dengan memastikan ketahanan nasional, mengembangkan kemandirian bangsa lewat swasembada pangan, energi, serta pemanfaatan optimal sumber daya alam.
3. Pengembangan Infrastruktur dan Lapangan Kerja yang difokuskan pada penyediaan infrastruktur berkualitas dan penciptaan lapangan kerja layak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
4. Penguatan SDM, Sains, Teknologi, dan Pendidikan guna meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, serta penguasaan teknologi dan inovasi oleh sumber daya manusia.
5. Pembangunan dari Desa dengan memprioritaskan pemberdayaan masyarakat desa, penguatan ekonomi lokal, dan pemerataan hasil pembangunan.
6. Reformasi Birokrasi melalui penguatan tata kelola pemerintahan, reformasi politik dan hukum, serta pemberantasan korupsi.

Arah kebijakan pembangunan 2026 diarahkan pada:

- Kedaulatan Pangan dan Energi dengan peningkatan kapasitas produksi pangan, diversifikasi produk, serta pengembangan energi baru dan terbarukan.
- Ekonomi Produktif dan Inklusif melalui penciptaan lapangan kerja berkualitas, pengembangan kewirausahaan, dan industri kreatif.
- Peningkatan Kualitas SDM lewat pendidikan yang relevan dengan kebutuhan zaman, kesehatan yang prima, dan keterampilan kerja yang adaptif.

- Pembangunan Berkelanjutan yang menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.
- Pemerataan Pembangunan agar seluruh wilayah, termasuk desa-desa terpencil, dapat merasakan manfaat pembangunan secara adil.

Merujuk pada Tema RKP 2026 tersebut, fokus pembangunan diarahkan pada penguatan kemandirian pangan dan energi, peningkatan kualitas SDM, penciptaan lapangan kerja berkualitas, dan pemerataan hasil pembangunan hingga ke desa-desa. Dalam konteks ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar berperan strategis melalui fungsi fasilitasi, promosi, dan kemudahan perizinan untuk menarik investasi yang sejalan dengan prioritas pembangunan nasional. Dukungan DPMPTSP meliputi:

1. Fasilitasi investasi di sektor pangan dan energi melalui kemudahan perizinan dan pendampingan pelaku usaha.
2. Promosi investasi inklusif yang membuka lapangan kerja dan memberdayakan UMKM di daerah.
3. Penguatan iklim usaha melalui reformasi prosedur perizinan, penerapan OSS yang optimal, dan layanan berbasis digital.
4. Koordinasi lintas sektor untuk memastikan investasi yang masuk mendukung pemerataan pembangunan dan keberlanjutan lingkungan.

Dengan strategi tersebut, DPMPTSP mempunyai peran penting dalam mewujudkan RKP 2026, memastikan investasi yang masuk tidak hanya produktif secara ekonomi tetapi juga memberi dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dan kemandirian bangsa.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif diperlukan prosedur perizinan yang sederhana, serta layanan penanaman modal yang cepat, transparan, dan akuntabel. Kemudahan berusaha menjadi faktor kunci dalam meningkatkan minat investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, untuk menanamkan modal di daerah. Oleh karena itu, ditetapkan tujuan strategis “Terwujudnya kemudahan berusaha yang mendorong realisasi investasi daerah” sebagai arah kebijakan dalam memperkuat daya saing dan menarik investasi yang berkelanjutan.

Pencapaian tujuan tersebut diukur melalui indikator Persentase Peningkatan Investasi. Selanjutnya, sasaran strategis yang ingin diwujudkan adalah “Meningkatnya daya tarik investasi daerah”, dengan indikator kinerja Realisasi Investasi (triliun rupiah)

sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaannya. Berikut disajikan tabel Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSP Tahun 2026:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar
Tahun 2026 – 2027

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Realisasi			Target	
					2023	2024	2025	2026	2027
1	Tujuan Terwujudnya kemudahan berusaha yang mendorong realisasi investasi daerah	Persentase peningkatan investasi	Peningkatan nilai investasi yang dicapai, baik dari PMDN maupun PMA, dalam suatu periode tertentu dibanding dengan periode sebelumnya, yang datanya berasal dari LKPM yang disampaikan oleh pelaku usaha skala UMK dan Non-UMK.	(Jumlah realisasi investasi tahun N – Jumlah realisasi investasi tahun N-1) ----- x 100% Jumlah realisasi investasi tahun N-1	11,54%	12,38%	12,38%	1,5%	2%
2	Sasaran Meningkatnya daya tarik investasi daerah	Realisasi investasi (Triliun rupiah)	Realisasi investasi adalah Nilai investasi yang dicapai, baik dari PMDN maupun PMA, dalam suatu periode tertentu yang datanya berasal dari LKPM yang disampaikan pelaku usaha skala UMK dan Non UMK	Jumlah realisasi investasi pada tahun berjalan	0,38506	0,43273	0,43273	0,44362	0,45250

Tabel 3.3 Strategi dan Arah Kebijakan DPMPTSP Kota Blitar

Visi : KOTA BLITAR YANG MAJU, SEHAT DAN SEJAHTERA MENUJU KOTA MASA DEPAN				
Misi 5 : Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar sebagai Kota Perdagangan, Jasa, Pariwisata dan Industri				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Meningkatnya daya tarik investasi daerah	Optimalisasi transformasi digital dan integrasi sistem layanan	a. Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik. b. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. c. Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 2. Program Promosi Penanaman Modal 3. Program Pelayanan Penanaman Modal 4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 5. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal 6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Penguatan investasi berbasis potensi lokal dan umkm	• Penyusunan Peta Potensi Investasi. • Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal. • Penyelenggaraan Kegiatan Promosi Penanaman Modal • Pelaksanaan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	

Visi : KOTA BLITAR YANG MAJU, SEHAT DAN SEJAHTERA MENUJU KOTA MASA DEPAN				
Misi 5 : Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar sebagai Kota Perdagangan, Jasa, Pariwisata dan Industri				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
		Peningkatan kepatuhan pelaku usaha	• Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko • Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha. • Pengawasan Penanaman Modal.	

Tabel 3.3 diatas menjelaskan kerangka strategis DPMPTSP Kota Blitar untuk mencapai visi pembangunan daerah, dengan fokus pada penciptaan iklim investasi yang kompetitif dan menunjukkan desain kebijakan investasi yang progresif dengan fokus pada digitalisasi, potensi lokal, dan kepatuhan.

Tabel 3.4 Indikator Kinerja Kunci Tahun 2026-2027

No	IKK	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Realisasi		Target	
				2024	2025	2026	2027
1	Persentase peningkatan investasi	Peningkatan nilai investasi yang dicapai, baik dari PMDN maupun PMA, dalam suatu periode tertentu dibanding dengan periode sebelumnya, yang datanya berasal dari LKPM yang disampaikan oleh pelaku usaha skala UMK dan Non-UMK.	$\frac{\text{Jumlah realisasi investasi tahun N} - \text{Jumlah realisasi investasi tahun N-1}}{\text{Jumlah realisasi investasi tahun N-1}} \times 100\%$	12,38%	12,38%	1,5%	2%

3.3 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar didasarkan pada sejumlah pertimbangan strategis, teknis, dan operasional yang bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, khususnya di bidang penanaman modal. Adapun faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Nasional dan Daerah
 - Penyesuaian terhadap arah kebijakan nasional seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan kebijakan percepatan kemudahan berusaha.
 - Kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar, Rencana Strategis DPMPTSP, serta dokumen perencanaan sektoral lainnya.
2. Kebutuhan Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah
 - Perlunya pengembangan iklim investasi yang kondusif melalui pemberian fasilitas dan insentif yang tepat sasaran.
 - Upaya meningkatkan posisi Kota Blitar sebagai tujuan investasi yang kompetitif di tingkat regional maupun nasional.
3. Tuntutan Kemudahan Berusaha
 - Penyesuaian prosedur perizinan dan nonperizinan agar lebih cepat, transparan, dan efisien.
 - Pemenuhan amanat Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya yang menekankan pelayanan perizinan secara elektronik dan terintegrasi.
4. Kebutuhan Promosi dan Ekspansi Pasar Investasi
 - Mendorong keterbukaan informasi peluang investasi melalui promosi yang terarah dan berkelanjutan.
 - Menjangkau investor potensial baik dalam negeri maupun luar negeri melalui kegiatan promosi yang sesuai karakteristik daerah.
5. Pengendalian dan Kepastian Hukum Investasi
 - Memastikan bahwa pelaksanaan investasi sesuai ketentuan perundang-undangan, izin yang diberikan, dan rencana investasi yang disepakati.
 - Mengantisipasi potensi sengketa, pelanggaran, atau keterlambatan pelaksanaan proyek investasi.
6. Penguatan Infrastruktur Data dan Sistem Informasi
 - Perlunya pengelolaan data dan informasi perizinan serta nonperizinan yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi.
 - Dukungan terhadap Sistem Online Single Submission (OSS) serta integrasi dengan sistem informasi daerah dan nasional.
7. Masukan dari Pemangku Kepentingan (Stakeholders)
 - Pertimbangan aspirasi pelaku usaha, asosiasi bisnis, masyarakat, dan instansi terkait dalam perumusan program.

- o Penyesuaian terhadap dinamika kebutuhan investor dan perkembangan teknologi pelayanan publik.

DPMPTSP Kota Blitar merencanakan pelaksanaan 6 program yang dijabarkan ke dalam 13 kegiatan dan selanjutnya terurai menjadi 45 sub kegiatan. Untuk mendukung pelaksanaan seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut, dibutuhkan alokasi anggaran sebesar Rp 5.053.534.022,00. Anggaran ini direncanakan untuk memastikan setiap target yang telah ditetapkan dapat terlaksana secara optimal dan memberikan dampak positif terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Tabel berikut dibawah ini merupakan daftar program, kegiatan dan sub kegiatan DPMPTSP Kota Blitar Tahun 2026.

Tabel 3.5 Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2026

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
	2	Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar		
	2.18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal		
1,	2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	
	2.18.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	2.18.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	
	2.18.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	2.18.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
	2.18.01.2.01.0013	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	
	2.18.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	
	2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
	2.18.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai standar	
	2.18.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
	2.18.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	
	2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	
	2.18.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
	2.18.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	2.18.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
	2.18.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
	2.18.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan	
	2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	
	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	
	2.18.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	
	2.18.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	
	2.18.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai kebutuhan	
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
	2.18.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	
	2.18.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	
	2.18.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	
	2.18.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
2,	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Realisasi Total terhadap Target Investasi	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Pemberian Fasilitas/ Insentif Bidang Penanaman Modal yang Ditetapkan	
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	
	2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	
	2.18.02.2.01.0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	
3,	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kerja Sama Penanaman Modal	
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	
4,	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	7. Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan 8. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penerbitan izin sesuai SOP	
	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota	
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	
5,	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan pengaduan yang dilaksanakan sesuai SOP	
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	
6	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data dan informasi perizinan yang terintegrasi	
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Renja DPMPTSP Kota Blitar Tahun 2026 disusun dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2024. Rencana tindak lanjut yang tercantum dalam LKJIP menjadi dasar untuk merumuskan program dan kegiatan prioritas yang tertuang dalam Renja 2026, sehingga perencanaan yang disusun tidak hanya berorientasi pada target RPJMD, tetapi juga merupakan jawaban langsung atas permasalahan dan rekomendasi perbaikan kinerja tahun sebelumnya.

Dengan mengintegrasikan rencana tindak lanjut LKJIP 2024 ke dalam Renja 2026, DPMPTSP Kota Blitar dapat memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan bukan hanya memenuhi target perencanaan tahunan, tetapi juga secara langsung menjawab tantangan dan kebutuhan riil yang dihadapi pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menjadikan Renja 2026 lebih responsif, terarah, dan berbasis pada hasil evaluasi kinerja yang terukur.

Rumusan rencana program, kegiatan, dan subkegiatan DPMPTSP Kota Blitar Tahun 2026 memuat 6 program, 13 kegiatan, dan 45 subkegiatan dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp6.127.484.522,00. Anggaran ini dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan, meliputi aspek penunjang, pelayanan, promosi, pembinaan, serta pengendalian investasi. Prakiraan maju untuk tahun 2027 disusun sebagai proyeksi kebutuhan pendanaan lanjutan untuk memastikan kesinambungan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang telah dimulai pada tahun 2026. Hal ini dilakukan agar target kinerja jangka menengah dapat dicapai secara optimal, meskipun realisasi anggaran tahun berjalan mungkin memerlukan penyesuaian terhadap ketersediaan fiskal daerah. Selanjutnya di bawah ini disajikan tabel Rencana Tindak Lanjut LKJIP Tahun 2024 pada Renja Tahun 2026 dan tabel Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan PD Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027.

Tabel 4.1 Rencana Tindak Lanjut LKJIP Tahun 2024 pada Renja Tahun 2026

No	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan mal pelayanan publik agar masyarakat dapat mengakses seluruh layanan publik dalam satu tempat	Menambah sarana dan prasarana Pendukung mal Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pmerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2	Meningkatkan sosialisasi dan pendampingan pendaftaran perizinan berusaha agar masyarakat yang memiliki usaha mempunyai legalitas izin.	• Menambah frekuensi pelayanan pendampingan perizinan berusaha) • Meningkatkan ragam bentuk sosialisasi melalui berbagai media untuk memperluas jangkauan sasaran penerima informasi	Program Pelayanan Penanaman Modal Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
3	Meningkatkan promosi investasi secara On Line baik melalui media sosial maupun website agar calon investor mengetahui potensi yang dimiliki Kota Blitar sehingga tertarik untuk melakukan investasi.	Menyusun strategi promosi	Program Promosi Penanaman Modal Kegiatan Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota Sub kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/ Kota

No	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
4	Meningkatkan Bimtek OSS dan pendampingan LKPM agar pelaku usaha tertib dalam pelaporan LKPM.	Melaksanakan bimtek OSS dan pendampingan LKPM	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha

Tabel 4.2 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan PD Tahun 2026
dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Nama PD: Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP			6.127.484.522,00					6.892.580.221
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			6.127.484.522,00					6.892.580.221
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			6.127.484.522,00					6.892.580.221
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			5.053.534.022,00				100 %	5.517.580.221
	[Meningkatkan fasilitas layanan kedinasan Perangkat Daerah]	Persentase fasilitas layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	100	5.053.534.022,00	-	-		-	5.517.580.221
2.18.01.2 .01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar</i>	100 %	33.051.400,00				100 %	28.975.357
2.18.01.2 .01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	4 Dokumen	2.001.400,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil		4 Dokumen	2.000.000
2.18.01.2 .01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	19 Laporan	2.000.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil		19 Laporan	2.975.357
2.18.01.2 .01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektor Daerah	<i>Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah</i>	1 Data	7.050.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil		1 Data	2.000.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.01.2 .01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	1 Berita Acara	10.000.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil		1 Berita Acara	2.000.000
2.18.01.2 .01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun</i>	11 Dokumen	2.000.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil		13 Dokumen	10.000.000
2.18.01.2 .01.0013	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	<i>Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan</i>	0 Berita Acara	10.000.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil		1 Berita Acara	10.000.000
2.18.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar</i>	10 0 %	3.036.919.536,00				100 %	3.147.648.359,0 0
2.18.01.2 .02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	25 Orang/bul an	3.034.919.536,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil		36 Orang/bul an	3.145.648.359,0 0
2.18.01.2 .02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD</i>	19 Laporan	2.000.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil		19 Laporan	2.000.000,00
2.18.01.2 .03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Persentase pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai standar</i>	100 %	2.406.000,00				100 %	3.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.01.2 .03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	6 Laporan	2.406.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil		6 Laporan	3.000.000,00
2.18.01.2 .05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar</i>	100 %	105.640.600,00				100 %	110.000.000,00
2.18.01.2 .05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	3 Paket	50.710.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil		2 Paket	55.000.000,00
2.18.01.2 .05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	148 Orang	54.930.600,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil		147 Orang	55.000.000,00
2.18.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar</i>	100 %	486.458.277,00				100 %	509.625.000,00
2.18.01.2 .06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	35.684.500,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil		1 Paket	36.750.000
2.18.01.2 .06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	5 Paket	109.998.300,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil		5 Paket	110.000.000
2.18.01.2 .06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	3 Paket	29.404.200,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil		3 Paket	42.000.000
2.18.01.2 .06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	20 Paket	44.000.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil		16 Paket	42.000.000
2.18.01.2 .06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	1 Paket	32.082.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil		1 Paket	32.125.000
2.18.01.2 .06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	5 Dokumen	18.366.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil		5 Dokumen	18.000.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.01.2 .06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	30 Laporan	149.969.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil		30 Laporan	150.000.000
2.18.01.2 .06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	10 Dokumen	66.954.277,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil		2 Dokumen	78.750.000
2.18.01.2 .07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase penyediaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan</i>	100 %	184.511.009,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil		100 %	320.000.000
2.18.01.2 .07.0005	Pengadaan Mebel	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	1 Unit	1.770.800,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil		12 Unit	100.000.000
2.18.01.2 .07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	7 Unit	127.418.500,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil		12 Unit	95.000.000
2.18.01.2 .07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	<i>Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan</i>	22 Unit	9.789.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil		1 Unit	25.000.000
2.18.01.2 .07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	1 Unit	45.532.709,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil			100.000.000,00
	[Meningkatnya fasilitas layanan kedinasan Perangkat Daerah]	Persentase fasilitas layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	100	5.053.534.022,00	-	-		-	-
2.18.01.2 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai kebutuhan</i>	100 %	995.048.800,00				100 %	993.685.665,00
2.18.01.2 .08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	24 Laporan	159.031.200,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil		24 Laporan	162.750.000,00
2.18.01.2 .08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	39 Laporan	836.017.600,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil		39 Laporan	830.935.665,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.01.2 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan</i>	100 %	209.498.400,00				100 %	404.645.840
2.18.01.2 .09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	0 Unit	56.667.600,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil			58.250.000
2.18.01.2 .09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	5 Unit	52.586.700,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil		5 Unit	58.300.000
2.18.01.2 .09.0005	Pemeliharaan Mebel	<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>	32 Unit	19.870.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil		10 Unit	70.095.840
2.18.01.2 .09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	74 Unit	44.874.100,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil		86 Unit	45.000.000
2.18.01.2 .09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	<i>Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara</i>	1 Unit	25.500.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil		1 Unit	10.000.000
2.18.01.2 .09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit	10.000.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil		1 Unit	100.000.000
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			59.914.400,00				100 %	120.000.000
	[Meningkatkan kemudahan berinvestasi]	Realisasi Total terhadap Target Investasi	100	59.914.400,00	-	-		-	120.000.000
2.18.02.2 .01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Kebijakan Pemberian Fasilitas/ Insentif Bidang Penanaman Modal yang Ditetapkan</i>	1 Dokumen	59.914.400,00				1 Dokumen	95.000.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.02.2 .01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	<i>Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal</i>	1 Dokumen	20.240.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil		1 Dokumen	20.000.000
2.18.02.2 .01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah</i>	1 Dokumen	27.827.600,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil		1 Dokumen	50.000.000
2.18.02.2 .01.0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	<i>Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</i>	1 Dokumen	11.846.800,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil		1 Dokumen	25.000.000
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			505.658.200,00				1 %	535.000.000
	[Meningkatkan jangkauan promosi penanaman modal]	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	0.6	505.658.200,00	-	-		-	535.000.000
2.18.03.2 .01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Kerja Sama Penanaman Modal</i>	1 Kerja Sama	505.658.200,00				1 Kerja Sama	535.000.000
2.18.03.2 .01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota</i>	1 Dokumen	484.476.600,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil		1 Dokumen	500.000.000
2.18.03.2 .01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/ Kota</i>	0 Dokumen	21.181.600,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil		0 Dokumen	35.000.000
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			378.377.900,00				100 %	420.000.000
	[Meningkatkan perizinan berusaha berbasis risiko] Sesuaikan dg pokin utk kinerjanya, rubah jg di SIPD renja	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	100 88.25	378.377.900,00	-	-		-	420.000.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.04.2 .01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Persentase penerbitan izin sesuai SOP</i>	100 %	378.377.900,00				100 %	420000000
2.18.04.2 .01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	<i>Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	1 Dokumen	8.250.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil		1 Dokumen	20.000.000
2.18.04.2 .01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i>	1500 Pelaku Usaha	100.898.600,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil		1500 Pelaku Usaha	125.000.000
2.18.04.2 .01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	<i>Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i>	120 Pelaku Usaha	59.031.200,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil		120 Pelaku Usaha	75.000.000
2.18.04.2 .01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	<i>Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha</i>	100 Kegiatan Usaha	210.198.100,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil		100 Kegiatan Usaha	200.000.000
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			110.000.000,00				100 %	180.000.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	[Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal]	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	100	110.000.000,00	-	-		-	180.000.000
2.18.05.2 .01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase penanganan pengaduan yang dilaksanakan sesuai SOP</i>	10 0 %	110.000.000,00				100 %	180.000.000
2.18.05.2 .01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	<i>Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya</i>	8 Kegiatan Usaha.	25.000.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil		12 Kegiatan Usaha.	45.000.000
2.18.05.2 .01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</i>	350 Pelaku Usaha	30.000.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil		350 Pelaku Usaha	75.000.000
2.18.05.2 .01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	<i>Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha</i>	200 Kegiatan Usaha	55.000.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil		250 Kegiatan Usaha	60.000.000
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			20.000.000,00				100 %	120.000.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	[Meningkatkan pemanfaatan dan informasi penanaman modal]	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	100	20.000.000,00	-	-		-	120.000.000
2.18.06.2 .01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data dan informasi perizinan yang terintegrasi	100 %	20.000.000,00				100 %	120.000.000
2.18.06.2 .01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	30 Dokumen	20.000.000,00	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil		30 Dokumen	120.000.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Blitar Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah, sekaligus menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan. Penyusunan Renja ini telah memperhatikan arah kebijakan pembangunan daerah, prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rancangan Awal RKPD Kota Blitar Tahun 2026, hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya, serta masukan dari pemangku kepentingan melalui musyawarah perencanaan pembangunan.

Seluruh rencana yang tertuang dalam Renja diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis daerah, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan, penguatan iklim penanaman modal, pengendalian pelaksanaan investasi, pengelolaan data dan informasi investasi, serta promosi potensi daerah secara efektif dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan Renja Tahun 2026, terdapat beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian:

1. Kesiapan Pelaksanaan

- Seluruh unit pelaksana perlu memastikan kesiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta dukungan regulasi agar program dan kegiatan dapat berjalan efektif sesuai target waktu.
- Koordinasi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan perlu diperkuat untuk menghindari tumpang tindih maupun keterlambatan pelaksanaan.

2. Ketersediaan dan Penyesuaian Anggaran

- Apabila ketersediaan anggaran sesuai dengan rencana kebutuhan, pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan secara penuh sesuai rancangan awal.
- Jika ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, perlu dilakukan penyesuaian skala prioritas dengan mempertahankan kegiatan yang memiliki dampak langsung dan signifikan terhadap pencapaian target kinerja, seperti pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan investasi, dan promosi potensi daerah.
- Penyesuaian dapat dilakukan melalui efisiensi belanja dan/atau pengaturan ulang jadwal pelaksanaan kegiatan yang bersifat jangka menengah/panjang.

3. Pemantauan dan Evaluasi

- Mekanisme pemantauan dan evaluasi berkala harus dijalankan untuk mengukur capaian indikator kinerja, mengidentifikasi kendala, dan melakukan perbaikan segera.
- Hasil evaluasi akan menjadi masukan penting bagi penyusunan Renja tahun berikutnya dan prakiraan maju.

Agar Renja Tahun 2026 dapat dilaksanakan secara efektif dan memberikan hasil yang optimal, maka perlu diperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaan berikut:

1. Kepatuhan terhadap Regulasi:

- Semua kegiatan yang dilaksanakan harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kebijakan pemerintah daerah dan nasional terkait perizinan dan pelayanan publik.

2. Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan

- Pemanfaatan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana dilakukan secara optimal untuk mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan.

3. Transparansi dan Akuntabilitas

- Proses pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi program dilakukan secara terbuka, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Koordinasi dan Sinergi

- Pelaksanaan kegiatan melibatkan koordinasi lintas perangkat daerah, dunia usaha, dan masyarakat guna memperkuat pencapaian hasil.

5. Adaptabilitas terhadap Perubahan

- Penyesuaian strategi dilakukan apabila terjadi perubahan kondisi, baik terkait regulasi, kebijakan, maupun ketersediaan anggaran.

Selain itu, sebagai bagian dari keberlanjutan pelaksanaan Renja, ditetapkan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Aksi: Mengembangkan rencana aksi yang lebih rinci untuk setiap program dan kegiatan yang telah direncanakan, termasuk penjadwalan dan penetapan tanggung jawab.
2. Penguatan Sistem Informasi: Membangun dan memperkuat sistem informasi yang mendukung pengelolaan data perizinan dan pelayanan publik, sehingga memudahkan akses informasi bagi masyarakat.
3. Peningkatan Layanan Digital: Mengembangkan platform digital untuk mempermudah proses pengajuan izin dan layanan lainnya, serta meningkatkan interaksi dengan masyarakat.

4. Evaluasi Berkala: Melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program untuk mengidentifikasi keberhasilan, tantangan, dan area yang perlu diperbaiki.
5. Pelaporan Hasil: Menyusun laporan hasil pelaksanaan program secara berkala.

Dengan berpegang pada kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut tersebut, diharapkan Renja Tahun 2026 dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan iklim investasi, dan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Blitar, 24 Juli 2025
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KOTA BLITAR



HERU EKO PRAMONO, S.STP. MM

Pembina Utama Muda
NIP. 197504091996021002